

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



Penyampaian LHP atas LKPD Propinsi Jawa Barat TA 2009

LKPD Provinsi Jawa Barat TA 2009 Mendapat Opini WDP

Bandung, Kamis (12 Agustus 2010) – Badan Pemeriksa Keuangan RI menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Propinsi Jawa Barat TA 2009, kepada DPRD dan Pemerintah Propinsi Jawa Barat pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD Propinsi Jawa Barat, pada hari ini (12/8).

Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD provinsi Jawa Barat TA 2009 menunjukkan bahwa **pemerintah Propinsi Jawa Barat belum dapat mencapai opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”**, melainkan masih mendapat opini “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)”. Hal-hal yang dikecualikan antara lain berupa:

1. Penyajian piutang pajak dan retribusi per 31 Desember 2009 sebesar Rp14,28 miliar di antaranya merupakan piutang pajak pada Dinas Pendapatan sebesar Rp11,65 miliar. Nilai piutang tersebut tidak didukung dengan rincian dan dokumen sumber yang memadai. Lebih lanjut, saldo tersebut berbeda sebesar Rp532,75 juta jika dibandingkan dengan saldo menurut Unit Pelayanan Pendapatan Daerah. Catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai piutang pajak per 31 Desember 2009.
2. Penyajian persediaan per 31 Desember 2009 sebesar Rp295,17 miliar di antaranya merupakan persediaan buku pada Dinas Pendidikan sebesar Rp7,97 miliar belum disajikan berdasarkan *stock opname*, dan nilai persediaan alat kesehatan dan obat-obatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp42,38 miliar belum berdasarkan *stock opname* secara menyeluruh. Nilai persediaan dapat berbeda secara signifikan jika Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah melakukan *stock opname* atas persediaan buku dan alat kesehatan secara menyeluruh.

Meskipun atas LKPD Propinsi Jawa Barat TA 2009 belum mencapai opini WTP, BPK menyatakan tetap memiliki harapan agar LKPD Propinsi Jawa Barat TA 2010 mendapat opini terbaik yaitu WTP. Namun BPK menyatakan bahwa **opini WTP tidaklah dapat diperoleh secara instan**, melainkan harus diwujudkan melalui proses berdasarkan input yang baik, proses yang baik, dan output yang baik sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik termasuk komitmen Gubernur Jawa Barat dan jajarannya. Hal ini dapat terwujud apabila ada hubungan kerja yang harmonis dan profesional antara pemerintah Propinsi Jawa Barat, DPRD dan semua pihak, termasuk komponen-komponen di dalamnya.

Untuk mewujudkan pencapaian opini WTP, BPK meminta kepada pemerintah Propinsi Jawa Barat untuk menyusun dan melaksanakan rencana aksi. BPK pun menyatakan tidak dapat memenuhi permintaan konsultasi yang menyangkut pertimbangan dan pendapat terkait pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, apalagi permintaan agar BPK ikut membantu pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam mengelola keuangan dan menyusun LKPD. BPK senantiasa menyarankan kepada pemerintah Propinsi Jawa Barat untuk mengkaji kembali ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkonsultasi kepada menteri dalam negeri sebagai pembina pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya, BPK meminta DPRD dan Gubernur Jawa Barat untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, yaitu meminta dibuatnya rencana aksi dan menyampaikan perkembangan tindak lanjut paling lambat 60 hari sejak hari ini. Khusus kepada DPRD Propinsi Jawa Barat, BPK mengharapkan DPRD dapat menindaklanjuti LHP BPK dengan melakukan pembahasan sesuai kewenangannya serta dapat memanfaatkan dan menggunakan informasi dalam laporan hasil pemeriksaan secara bijak. BPK pun menyarankan kepada DPRD untuk mempertimbangkan pembentukan alat kelengkapan seperti halnya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) di DPR RI atau Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) di DPD RI agar pembahasan tindak lanjut di DPRD menjadi lebih fokus.

-BIRO HUMAS DAN LUAR NEGERI-

Informasi lebih lanjut: Humas BPK, Telp. 021 5704395 Ext. 1184/1192

Fax. 021 57953198, Email : ksbhumas@bpk.go.id